

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah didasarkan asas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dan situasi satuan wilayah yang bersangkutan. Dengan daerah tidak saja mengurus rumah tangganya sendiri tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Pusat di daerah. Tentu saja hal ini membuat beban yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah tidaklah ringan, dan untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut dibutuhkan sumber-sumber keuangan yang besar.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang (selanjutnya disebut dengan UU PKPD) menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Otonomi Daerah secara efektif diberlakukan. PAD menjadi andalan daerah dalam penyumbang pendapatan

daerah, pada sisi lain Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengembangkan dan menumbuhkan kemandirian daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat. Sebagai pelaku ekonomi maupun sosial budaya, peran serta masyarakat menempati posisi tertinggi dan karena itu perlu senantiasa dilibatkan dalam mendukung upaya menumbuhkan kemandirian daerah.

Dengan sejak diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah perlu berupaya untuk mengoptimalkan penghasilan asli daerahnya utamanya yang bersumber dari pajak daerah guna menambah APBD yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa harus menggantungkan kepada pemerintah pusat.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Syuhada Sofian, 1997).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Bandar Lampung diantaranya yaitu pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2011 - 2014 Kota Bandar Lampung**

Tahun	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	%
2011	Pajak hotel	5.954.342.000.00	6.642.066.164.00	111.55
	Pajak restoran	7.249.896.000.00	8.653.596.301.00	119.36
	Pajak hiburan	2.350.000.000.00	2.607.935.632.00	110.98
	Pajak reklame	3.700.675.538.00	3.744.573.415.00	101.19
	Pajak penerangan jalan	32.000.000.000.00	33.520.637.993.00	104.75
	Pajak bumi dan bangunan	-	-	-
	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	-	-	-
	Jumlah pajak daerah	51.254.913.538.00	56.627.114.786.48	107.63
	Pendapatan asli daerah	84.167.470.269.17	87.711.803.840.41	104.21
2012	Pajak hotel	8.850.442.000.00	10.464.084.252.00	118.23
	Pajak restoran	18.000.000.000.00	13.500.286.358.00	75
	Pajak hiburan	3.000.000.000.00	3.048.834.184.00	101.63
	Pajak reklame	8.000.000.000.00	6.315.626.735.00	78.95
	Pajak penerangan jalan	33.500.000.000.00	37.551.145.206.00	112.09
	Pajak bumi dan bangunan	-	-	-
	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	28.200.000.000.00	-	139.32
	Jumlah pajak daerah	104.234.442.000.00	112.602.140.715.00	108.03
	Pendapatan asli daerah	156.796.491.183.50	162.722.590.331.88	103.81

**Tabel 1 Target dan Realisasi Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2011 - 2014 Kota Bandar Lampung (lanjutan)**

Tahun	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	%
2013	Pajak hotel	10.221.724.192.00	10.530.259.469.56	103.02
	Pajak restoran	20.000.000.000.00	17.284.202.625.21	86.42
	Pajak hiburan	3.693.098.000.00	4.381.068.935.00	118.63
	Pajak reklame	11.000.000.000.00	14.462.490.287.00	131.48
	Pajak penerangan jalan	44.000.000.000.00	50.747.328.239.00	115.33
	Pajak bumi dan bangunan	51.500.000.000.00	39.082.402.187.00	75.89
	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	37.500.000.000.00	43.556.504.817.00	116.15
	Jumlah pajak daerah Pendapatan asli daerah	183.315.622.192.00	183.436.575.291.26	100.07
2014	Pajak hotel	15.000.000.160.00	12.335.668.039.50	82.24
	Pajak restoran	21.000.000.000.00	20.543.727.774.60	97.83
	Pajak hiburan	7.199.999.464.00	5.794.133.258.08	80.47
	Pajak reklame	18.000.000.000.00	16.766.782.818.00	76.21
	Pajak penerangan jalan	61.251.003.650.00	57.030.428.651.00	93.11
	Pajak bumi dan bangunan	80.000.000.000.00	45.891.610.670.00	57.36
	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	58.199.999.838.00	79.756.445.254.00	137.04
	Jumlah pajak daerah Pendapatan asli daerah	271.516.090.306.00	242.655.037.332.18	89.37
		417.747.740.815.52	367.280.104.011.88	87.92

Memperhatikan tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pajak reklame sebagai salah satu sektor pendapatan daerah termasuk sektor yang juga mengalami peningkatan setiap tahun nya, walaupun demikian pada praktek nya penyerapan penerimaan daerah dari sektor tersebut masih kurang dari target yang ditentukan oleh

Pemerintah Kota Bandar Lampung. Capaian target penerimaan pajak reklame setiap tahun masih berfluktuasi. Pada tahun 2011-2014 secara berurut mencapai 101,19%, 78,95 %, 131,48 % dan 76,21 %. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang sangat potensial di masa mendatang, selain mulai tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan yang baru dan dibangunnya berbagai macam properti serta berbagai usaha lainnya diberbagai sudut kota di Bandar Lampung yang pada akhirnya membutuhkan media reklame agar dikenal luas oleh masyarakat. Bertambahnya jumlah jalan-jalan baru dan jalan-jalan lingkar kota juga mengakibatkan bertambahnya jumlah reklame pada titik titik tertentu. Perkembangan perekonomian di Bandar Lampung menyebabkan munculnya bangunan baru yang menggunakan reklame. Efek dari perkembangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dimana kondisi yang sebelumnya masih belum diperbaiki dan setelah adanya perbaikan maka status jalan-jalan yang semula hanya sebagai sarana dan prasarana saja telah berubah fungsi ekonomisnya. Nilai reklame pada jalan-jalan utama yang telah berubah fungsi tersebut menjadi titik-titik yang lebih strategis untuk pemasangan reklame, juga merubah nilai sewanya.

Tabel 2 Kuantitas Pemasangan Reklame dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011 - 2014

Tahun	Kuantitas Pemasangan Reklame (pemasangan)	Persentase kenaikan (%)	Jumlah penerimaan Pajak Reklame (Rupiah)	Persentase kenaikan (%)
2011	1371		3.744.573.415.00	
2012	1967	43.47 %	6.315.626.735.00	68.66
2013	2411	22.57 %	14.462.490.287.00	128 .99
2014	2769	14.48 %	16.766.782.818.00	15.93

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan dari sektor pajak reklame setiap tahun nya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat investasi dan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Tetapi secara persentase peningkatannya belum stabil, dengan kata lain peningkatan wajib pajak belum diimbangi dengan optimalnya jumlah penerimaannya. Hanya di tahun 2013 penerimaan dari sektor ini mengalami peningkatan yang pesat dari segi jumlah penerimaannya sebesar 128.99 % dari tahun sebelumnya walaupun tingkat pertumbuhan wajib pajak nya hanya sebesar 22.57 % dari tahun sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang menganalisis pajak secara umum dan pajak daerah secara khusus juga memasukan pertumbuhan ekonomi sebagai pengaruh. Kondisi perekonomian yang baik akan menciptakan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih bagus serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Sutrisno (2002) dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk, jumlah industri, dan petugas pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

B. Permasalahan

Pemerintah Kota Bandar Lampung sedang melakukan proses pembangunan yang memerlukan biaya relatif besar. Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor penerimaan untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Besarnya penerimaan pajak reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah tersebut. Di samping itu partisipasi

dan peran serta masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan pajak reklame khususnya wajib pajak reklame. Berdasarkan uraian latar belakang serta data tentang perkembangan wajib pajak dan total penerimaan dari sektor pajak reklame di Kota Bandar Lampung terlihat bahwa tidak proporsional nya antara perkembangan wajib pajak dan total penerimaan pajak reklame nya. Perkembangan total penerimaan pajak reklame antara tahun 2011 hingga tahun 2014 merupakan total penerimaan dari sektor pajak reklame yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Dimana tarif pajak dari masing-masing jenis reklame telah diatur di peraturan daerah tersebut dan masih berlaku hingga saat ini. Kenaikan pendapatan dari sektor pajak reklame dikarenakan adanya kenaikan jumlah wajib pajak reklame dan bukan karena kenaikan tarif pajak reklame yang dirasionalisasi. Pada umumnya peraturan daerah yang memuat tarif pajak tersebut berlaku dalam jangka waktu yang lama tanpa memperhatikan inflasi rata-rata per tahun di daerah Kota Bandar Lampung, maka perlu adanya penyesuaian tarif pajak reklame serta target penerimaan yang harus dirasionalisasi dengan memperhatikan kenaikan inflasi di daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah tarif pajak dari masing-masing jenis pajak reklame telah sesuai dengan rasionalisasi tarif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu?

2. Sejauhmana pertumbuhan kuantitas pemasangan reklame dan tarif yang telah dirasionalisasi berpengaruh terhadap target penerimaan di masa yang akan datang?
3. Apakah target penerimaan pajak reklame dapat meningkat di masa datang dan peningkatannya melampaui inflasi di Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya tarif yang ideal dari masing-masing jenis pajak reklame di tahun-tahun berikutnya.
2. Untuk mengetahui selisih antara realisasi penerimaan pajak reklame sebelum dan sesudah rasionalisasi.
3. Untuk mengetahui besarnya target penerimaan yang ideal dari sektor pajak reklame di tahun-tahun berikutnya.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai keberadaan sektor pajak reklame di Kota Bandar Lampung.
2. Memaparkan hasil rasionalisasi pajak reklame dari segi perbaikan tarif dan target penerimaan untuk tahun-tahun mendatang.
3. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Tahun 2001 merupakan tahun yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang semula bersifat sentralistik di masa orde baru yang diterjemahkan melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1974 telah dirubah dalam suatu pola hubungan yang lebih bersifat desentralisasi, dimanifestasikan melalui dasar hukum UU No.22 Tahun 1999 serta UU No.25 Tahun 1999 yang kini telah direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004. Besaran perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tersebut dapat disimak dari pergeseran dari sejumlah model dan paradigma pemerintah daerah, dari “structural efficiency model” yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintah lokal dirubah menjadi “local democracy model” dengan penekanan pada nilai-nilai demokrasi dan keberagaman di dalam penyelenggaraan pemerintah lokal (Bhenyamin Hoessein, 2002).

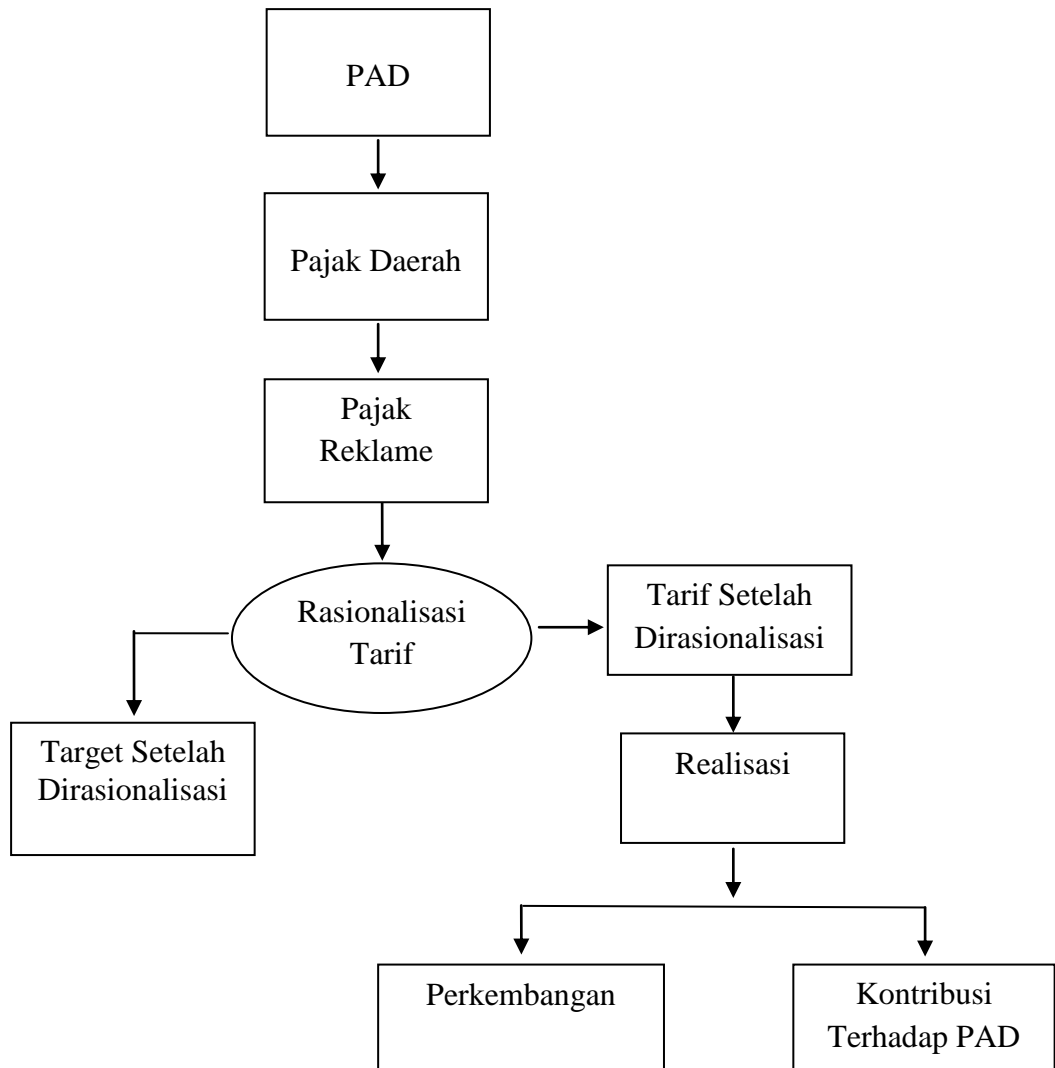
Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal khusus nya melalui pendapatan asli daerah (Sidik, 2002). Pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol atau kewenangan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwasanya pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Namun di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah merupakan penyumbang terbesar. Pajak daerah memiliki peranan penting bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Optimalisasi penerimaan pajak atau upaya fiskal (fiscal effort) yang memperlihatkan seberapa besar upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik masyarakat setempat.

Pajak reklame yang merupakan salah satu komponen penerimaan daerah dari sektor pajak daerah sangat menarik untuk diangkat. Mengingat pembangunan daerah di Kota Bandar Lampung cukup mendapat perhatian yang pesat dengan semakin berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana jalan serta pusat-pusat perekonomian di kota ini. Oleh sebab itu perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah yang dalam hal ini wewenang nya dilimpahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung apakah perkembangan penerimaan pajak reklame sesuai atau berjalan lurus dengan pesatnya pembangunan di Kota Bandar Lampung

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian**F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada dan akan diuji kebenarannya secara ilmiah. Dari permasalahan yang dikemukakan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame akan meningkat di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kenaikan kuantitas pemasangan reklame serta rasionalisasi tarif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Realisasi penerimaan pajak reklame akan lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan sebelum tarif dirasionalisasi dan kenaikannya melampaui inflasi di Bandar Lampung.
3. Jika tarif naik sesuai inflasi maka target penerimaan di masa datang akan meningkat minimal sekian persen.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian yang berisikan Data dan Sumber Data, Alat Analisis, dan Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung.

Bab IV Hasil Perhitungan dan Pembahasan.

Bab V Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN